

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga pendidikan pesantren saat ini tidak hanya menjadi satuan pendidikan alternatif atau menjadi bengkel siswa/santri yang kurang memperoleh pendidikan dan pembinaan akhlak serta pemahaman agama Islam, namun pondok pesantren telah menjadi lembaga pendidikan yang banyak diminati oleh masyarakat, dimana santri pada pondok pesantren (PONPES) tidak hanya berasal dari masyarakat yang berlatarbelakang dari keluarga ulama, kyai atau ustadz, namun santri pondok pesantren saat ini berasal dari berbagai latar belakang keluarga yang berbeda-beda, baik petani, pedagang, pengusaha, pegawai, pejabat dan lain sebagainya. Kecenderungan orang tua memilih pondok pesantren sebagai tempat pendidikan menjadi indikator bahwa pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan anak yang kompleks, pesantren dapat melahirkan kultur masyarakat agamis dan moderat, pesantren menanamkan pendidikan karakter, kemandirian, kewirausahaan, sampai pada pendidikan sains dan teknologi telah menjadi bagian dari kurikulum yang dikembangkan oleh pondok pesantren. Kompleksitas pendidikan pondok pesantren menjadi potensi riil di era global yang kompetitif saat ini. Kultur dan peran strategis menjadi peluang bagi masyarakat dan organisasi atau yayasan untuk mendirikan dan mengembangkan pondok pesantren sebagai jawaban terhadap tuntutan zaman dan harapan masyarakat.

Pesantren di Indonesia mempunyai reputasi tersendiri sebagai lembaga yang bercirikan agama Islam. Pesantren merupakan institusi pendidikan yang

cukup kompleks. Pertama, pesantren sebagai lembaga pendidikan. Kedua, pesantren sebagai lembaga sosial kemasyarakatan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, pesantren tidak hanya berpedoman pada kurikulum system pendidikan nasional (SISDIKNAS), namun memiliki ciri khas yang membedakannya dengan penyelenggara pendidikan lain seperti kajian kitab kuning, penguasaan bahasa asing serta kegiatan *life skill* yang akan menjadi bekal santri di masa yang akan datang. Sedangkan sebagai lembaga sosial kemasyarakatan pesantren diharapkan kehadirannya dalam rangka *changing and developing* masyarakat, dimana alumni pesantren dapat mengambil peran dan berkontribusi positif dalam pembangunan masyarakat dan daerah.

Pondok pesantren (PONPES) adalah salah satu lembaga pendidikan yang telah dikembangkan di Indonesia sejak abad ke-19 (Herman, 2013). Pesantren merupakan lembaga yang memiliki system pendidikan pertama dan tertua di Indonesia, karena sifat keislaman dan keindonesiaan terintegrasi dalam pesantren menjadi daya tariknya. Hal ini sejalan dengan fungsi Pendidikan Nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan pesantren bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab.

Mewujudkan tujuan pendidikan dimaksud harus memiliki manajemen dan strategi yang tepat. Selain kurikulum dan sarana prasarana yang memadai, dibutuhkan konsep dan perencanaan yang sistemik, kontrol, dan pengawasan

yang ketat serta lokasi yang dapat dijangkau oleh pengelola lembaga pendidikan. Manajemen dan kurikulum yang dikembangkan untuk mewujudkan tujuan pendidikan dimaksud adalah adanya lembaga pendidikan dengan pola pendidikan, pembinaan dan pengawasan selama 24 jam oleh guru dan pengelola sekolah yang dikemas dalam bentuk sekolah berasrama (*boarding school*). Model dan system pendidikan *boarding school* yang dikembangkan saat ini pada dasarnya adalah kurikulum dan manajemen yang berbasis pesantren (Akib, La Tiga; 2021). Hal ini menunjukkan bahwa pondok pesantren dengan berbagai metode pembinaan dan kurikulum pendidikan yang dikembangkan telah banyak menginspirasi praktisi dan pengelola lembaga pendidikan sebagai upaya mewujudkan tujuan pendidikan. Karenanya PONPES sangat diharapkan menjadi penopang berkembangnya sistem pendidikan yang ada di Indonesia sebagai negara yang mayoritas berpenduduk Islam, termasuk di Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara.

Kabupaten Pulau Taliabu adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Maluku Utara. Kabupaten ini adalah hasil pemekaran dari kabupaten Kepulauan Sula yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI 14 Desember 2012 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2013. Kabupaten ini terdiri atas 8 (delapan) kecamatan dan 71 (tujuh puluh satu) desa. Kedelapan kecamatan di Pulau Taliabu adalah: (1) Kecamatan Taliabu Barat, (2) Kecamatan Taliabu Barat Laut, (3) Kecamatan Ledo, (4) Kecamatan Taliabu Utara, (5) Kecamatan Taliabu Timur, (6) Kecamatan Taliabu Timur Selatan, (7) Kecamatan Taliabu Selatan, dan (8) Kecamatan Tabona.

Penduduk Kabupaten Pulau Taliabu menurut sensus penduduk tahun 2021 adalah sebanyak 54.047 jiwa dengan berbagai suku bangsa, meliputi suku-suku pribumi seperti: suku Mange, suku Kadai, suku Siboyo, suku Panto. Disamping itu terdapat suku-suku lainnya yang dikenal sebagai suku pendatang, meliputi: suku Buton, Banggai, Jawa, Bugis, dan suku Makassar. Penduduk kabupaten Pulau Taliabu sebagian besar beragama Islam dengan persentase sebesar 71,16% atau sebanyak 43.843 jiwa, sedangkan agama Kristen sebesar 18,98% atau sebanyak 9.064 jiwa, yang beragama Katolik sebesar 5,86% atau sebanyak 1.125. Selebihnya memeluk agama Hindu dan kepercayaan asli masyarakat Taliabu. (BPS, 2021:45).

Dengan eksistensi penduduk yang mayoritas beragama Islam dengan persentase (71,16%) seperti disebutkan di atas, idealnya diikuti oleh adanya lembaga pendidikan yang berlatar belakang Pendidikan Agama Islam seperti madrasah dan pondok pesantren (PONPES) atau semacamnya, baik yang didirikan oleh pemerintah dibawah binaan Kementerian Agama maupun yang didirikan oleh masyarakat. Akan tetapi, jumlah populasi seperti dimaksud tidak berbanding lurus dengan jumlah lembaga-lembaga pendidikan yang berlatar belakang Islam seperti madrasah dan pondok pesantren (PONPES). Dari data yang ada, diketahui bahwa lembaga pendidikan di Kabupaten Pulau Taliabu berjumlah 159 (seratus lima puluh sembilan) satuan pendidikan yang terdiri atas 89 SD, 5 MI, 3 SMP, 8 MTs, 12 SMA, 7 SMK dan 4 MA. Selain itu, terdapat 2 pondok pesantren, yaitu PONPES Darul Amanah Taliabu yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Darul Amanah Taliabu yang terletak di kecamatan Taliabu Barat Laut dan PONPES Al-Fatah Kilong yang

didirikan oleh Yayasan Pendidikan Al-Fatah di Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu. (BPS, 2021: 73-87).

Data di atas memberikan gambaran bahwa, kurangnya lembaga PONPES yang didirikan di kabupaten Pulau Taliabu disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, kurangnya dermawan Islam yang ingin menginvestasikan sebagai dari kekayaan untuk mendirikan lembaga PONPES pada wilayah-wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu. Kedua, adanya anggapan masyarakat bahwa PONPES hanya menghasilkan sumber daya manusia yang hanya mampu berdakwah dalam bidang agama Islam tetapi memiliki keterbatasan dalam bidang pengetahuan umum. Ketiga, adanya pandangan dari orang tua santri yang beranggapan bahwa kurikulum yang diberlakukan dalam PONPES hanyalah kurikulum yang memberikan pengalaman belajar dalam mengkaji kitab kuning, namun tidak memiliki pengalaman belajar dalam bidang sains dan teknologi (saintek). Keempat, bahwa kurangnya sosialisasi dari yayasan pendidikan Islam akan pentingnya pendidikan PONPES dalam menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dibidang agama dan pengetahuan umum sebagai perwujudan tujuan pendidikan nasional dan amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa manusia Indonesia adalah manusia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa menurut agama dan keyakinannya, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang System Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Pesantren yang telah memiliki nilai historis dalam membina dan mengembangkan masyarakat, kualitasnya harus terus didorong dan

dikembangkan. Proses pembangunan manusia yang dilakukan pesantren tidak bisa dipisahkan dari proses pembangunan manusia yang tengah diupayakan pemerintah. Proses pengembangan dunia pesantren selain menjadi tanggung jawab internal pesantren, juga harus didukung oleh perhatian yang serius dari berbagai pihak. Meningkatkan dan mengembangkan peran serta pesantren dalam proses pembangunan membutuhkan langkah strategis dalam membangun masyarakat, daerah, bangsa, dan negara. Pesantren harus menjadi pelopor sekaligus inspirator pembangkit moral bangsa. (Sabil & Diantoro. 2021:210-211).

Eksistensi dan keunggulan pesantren sebagaimana digambarkan di atas sejatinya menjadi energi positif bagi pengembangan pondok pesantren di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Pulau Taliabu. Namun menurut pengamatan penulis, pondok pesantren di Pulau Taliabu belum mengalami perkembangan. Hal ini terlihat ketika penulis dalam beberapa kesempatan berkunjung ke PONPES di Pulau Taliabu, penulis mencoba mengamati dan berdiskusi dengan Pengasuh pondok pesantren terkait dengan perkembangan dan peluang pengembangan pondok pesantren. Salah satu pengasuh pondok pesantren Darul Amanah Pulau Taliabu menyampaikan beberapa informasi terkait perkembangan serta kendala yang dihadapi pesantren di Pulau Taliabu antara lain: 1) Kurangnya sosialisasi dan kerjasama yayasan dengan pihak luar baik pemerintah maupun masyarakat umum; 2). Manajemen pesantren diserahkan sepenuhnya kepada pengasuh/Kiai; 3) Sumber pendanaan pesantren yang belum tetap; 4) belum adanya lembaga pendidikan formal seperti Madrasah Diniyah, MI, MTs dan MA pada lingkungan pesantren; 5) sarana

dan prasaranan yang belum memadai. Kondisi tersebut menjadi faktor-faktor yang dapat menghambat pengembangan pondok pesantren di Pulau Taliabu. Sebahagian santri pondok pesantren yang tinggal di lingkungan pondok pesantren harus mengikuti pendidikan formal pada sekolah yang relatif jauh dari lingkungan pesantren, sebahagian lagi memilih untuk tinggal di luar pesantren agar bisa menjangkau pendidikan formal yang kemudian dengan beberapa pertimbangan orang tua santri memilih menyekolahkan anaknya pada pesantren di luar Pulau Taliabu.

Gambaran peluang dan hambatan pengembangan pondok pesantren di atas memotivasi penulis untuk meneliti lebih dalam bagaimana cara dan langkah yang tepat agar pondok pesantren di Pulau Taliabu dapat berkembang dengan baik.

1.2 Fokus Penelitian

Dari latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan pada bagaimana Manajemen Strategi Pengembangan Pondok Pesantren di Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara.

1.3 Rumusan Masalah

Penelitian ini didasari beberapa hal sebagaimana digambarkan pada latar belakang di atas, penelitian ini dikonsentrasikan pada pokok permasalahan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pengembangan pondok pesantren di Kabupaten Pulau Taliabu?
2. Bagaimana manajemen strategi pengembangan pondok pesantren di Kabupaten Pulau Taliabu?

1.4 Tujuan Penelitian

Memperhatikan permasalahan sebagaimana dirumuskan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui lebih dalam dan mendeskripsikan gambaran umum tentang pengembangan pondok pesantren di Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara.
2. Mengetahui lebih dalam dan mendeskripsikan manajemen strategi pengembangan pondok pesantren di Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari peneliti ini antara lain:

1. Bagi pemerintah kabupaten Pulau Taliabu, Kementerian Agama, yayasan, organisasi masyarakat Islam atau lembaga pendidikan Islam dan umat Islam pada umumnya, penelitian ini dapat menjadi data dan informasi penting dalam upaya pengembangan pondok pesantren di Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara;
2. Bagi pengelola pondok pesantren di Pulau Taliabu khususnya pondok pesantren Darul Amanah Taliabu di Kecamatan Taliabu Barat Laut dan pondok pesantren cabang Al-Fatah Kilong di Kecamatan Taliabu Barat, Penelitian ini dapat berguna sebagai referensi dan masukan dalam rangka memantapkan manajemen strategi pondok pesantren yang maju dan berkembang.
3. Sebagai referensi bagi pembaca dan peneliti selanjutnya dalam upaya pengembangan pondok pesantren.

1.6 Definisi Operasional

Untuk menghindari interpretasi yang berbeda dan kekeliruan dalam menafsirkan maksud dan rencana penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis memberikan definisi operasional yang menjadi fokus penelitian.

1. Manajemen strategi adalah seni dan ilmu untuk menentukan cara dan taktik memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya, menciptakan peluang baru dengan perencanaan jangka panjang, dan mengoptimalkan trend sekarang untuk masa mendatang.
2. Pengembangan adalah suatu proses atau usaha untuk melakukan suatu perubahan ke arah lebih baik, yang dilaksanakan secara perlahan atau secara bertahap.
3. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang didirikan oleh perseorangan, yayasan atau organisasi masyarakat Islam yang menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kurikulum khas pesantren (kitab kuning) dan dapat mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pengembangan pendidikan.

Berdasarkan pengertian di atas maka penulis memberikan definisi operasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konsep, usaha dan langkah tepat yang dilakukan dalam upaya pengembangan pondok pesantren di Kabupaten Pulau Taliabu, mulai dari formulasi strategi, implementasi strategi, evaluasi strategi, sampai dengan adanya desain strategi yang hendak meningkatkan status, kapasitas, dan sumberdaya yang dapat melahirkan postur baru organisasi yang maju dan kompetitif.